

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan disuatu wilayah dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian perubahan untuk menuju kearah yang lebih baik dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, olehnya itu indikator yang digunakan dalam mengukurnya yakni adanya pertumbuhan ekonomi diwilayah terebut. Sementara menurut Sumiyarti (2022) yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi yakni bertambahnya tingkat pendapatan masyarakat yang diukur secara global dalam suatu wilayah atau dapat diistilahkan bahwa sebuah pertumbuhan ekonomi ditandai dengan adanya kenaikan seluruh nilai tambah (*Added Value*) yang dirasakan oleh masyarakat.

Pasca merebaknya Pandemi Covid-19 yang puncaknya terjadi pada Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sempat terpuruk di angka minus 2.07%, kemudian menurut hasil pendataan BPS (2022) Pertumbuhan Ekonomi Indonesia mulai memperlihatkan trend positif di Tahun 2021 dengan kenaikan sebesar 3.69% dan benar-benar telah dinyatakan bangkit setelah di Tahun 2022 tercatat beberapa daerah dalam satu cakupan pula mampu mencapai trend pertumbuhan rata-rata 5.10% hingga 10,23%. termasuk untuk wilayah Sulawesi secara menyeluruh diketahui memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi berada di angka 5.90%.

Pertumbuhan Ekonomi secara makro menurut Leasiwal (2022) merupakan suatu proses pertumbuhan *output* per kapita dalam jangka panjang. Penekanan terhadap pengertian tersebut terletak pada tiga aspek yaitu Proses, *Output* Perkapita dan Jangka Panjang. Sehingga jika merujuk pada ketiga aspek tersebut maka Pertumbuhan Ekonomi dapat pula diartikan sebagai sebuah proses yang bersifat dinamis artinya ukuran pertumbuhan dalam rentang waktu tertentu dapat berubah seiring dengan peningkatan *Output* Perkapita dari suatu wilayah terhadap pemanfaatan barang dan jasa.

Sadono (2021) mengemukakan bahwa untuk dapat mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maka indikator yang digunakan tentunya harus tepat, sebab akan berbeda nilai ukur untuk suatu wilayah dengan cakupan luas seperti negara dibanding dengan pertumbuhan ekonomi untuk wilayah setingkat daerah. Olehnya itu Abdul Rajab (2023) menjelaskan bahwa untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara maka indikator yang digunakan yakni Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), sementara untuk melihat pertumbuhan suatu wilayah yang dibawah oleh suatu negara seperti Provinsi dan Kabupaten, maka indikator yang digunakan adalah tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Bruto (PDB) untuk skala wilayah setingkat negara menurut Siagian, P. Sondang (2020) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan disebuah oleh sebuah Negara dalam periode

tahun tertentu dengan faktor produksi yang dihasilkan oleh rakyat. Sehingga semakin meningkat pertumbuhan PDB artinya permintaan akan Barang dan Jasa maka juga mengalami peningkatan, kondisi ini juga menandakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga akan meningkat sebab dapat memicu semakin tingginya faktor-faktor produksi ditingkat daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sendiri menurut Kuncoro (2020) kaitannya sebagai alat ukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah setingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota, secara luas dapat diartikan dengan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Berdasar pada pandangan-pandangan tersebut Sumiryati (2022) menyimpulkan bahwa semakin tinggi pencapaian PDRB di setiap daerah menandakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut juga mengalami peningkatan, sehingga jika semua daerah memiliki tingkat pencapaian PDRB yang semakin baik, maka PDB ditingkat Nasional juga akan menunjukkan peningkatan. Olehnya itu rata-rata pemerintahan di daerah dalam konsep pengembangan pembangunannya selalu berupaya melakukan pembelanjaan yang arahnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) khususnya bagi daerah Kabupaten/Kota saat telah dijadikan sebagai simbol dari

tingkat kesejahteraan masyarakat, bahkan telah menjadi sebuah target pencapaian yang harus diraih oleh pemerintah daerah setiap tahunnya. Olehnya itu menurut Prisilia Tempone (2020) bahwa untuk mampu mendukung peningkatan terhadap PDRB disuatu daerah maka Campur tangan pemerintah di perlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang salah satunya adalah melalui pengeluaran pemerintah.

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Parno (2023) pada hasil penelitiannya bahwa dalam mendukung peningkatan PDRB disetiap daerah, maka perilaku efesiensi anggaran merupakan tindakan yang wajar dilakukan untuk mengoptimalkan arah kebijakan pembangunan, akan tetapi terhadap permasalahan efesiensi tersebut arah kebijakannya lebih diutamakan pada konsep pembangunan yang dapat memberikan imbas kepada kesejahteraan masyarakat.

Penekanan lebih tegas terhadap peran pemerintah dalam meningkatkan PDRB suatu daerah bahkan dikemukakan oleh Sumiryati (2022) bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi disuatu daerah sehingga dapat berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat maka intervensi pemerintah menjadi sangat penting melalui belanja publik. Adapun terhadap permasalahan keterbatasan anggaran yang dihadapi oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah, tentunya tidak dapat dijadikan alasan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, tentunya dalam

menyikapi keterbatasan tersebut urgensi terhadap belanja publik harus betul-betul terarah kepada belanja pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengkaji tentang pertumbuhan ekonomi jika dikaitkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tentunya masing-masing daerah memiliki problematika tersendiri. Adapun objek sasaran dalam penelitian akan difokuskan untuk mencermati tentang perkembangan PDRB di Kabupaten Pinrang dihubungkan dengan kebijakan dalam Pengelolaan Belanja Publik. Hal yang menarik untuk dicermati di daerah ini karena siklus permasalahan pertumbuhan ekonominya sangat fluktuatif dimana sejak Tahun 2014 hingga Tahun 2023 mengalami Trend menurun. Adapun perkembangan terhadap siklus pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada Grafik berikut :

Gambar 1.1
Siklus Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang
Tahun 2014-2023



Sumber : Berita Resmi Statistik Kab Pinrang No. 05/02/7315/Th.IV, 29 Feb 2024

Siklus Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang berdasarkan Data yang dituangkan pada Gambar 1.1 tersebut menunjukkan bahwa

Pasca terjadinya Pandemic Covid-19 dimana laju pertumbuhan Ekonomi hanya mampu meningkat sebesar 0.44%, namun ketika perbaikan ekonomi mulai membaik bahkan menunjukkan peningkatan yang signifikan, akan tetapi laju pertumbuhan tersebut kembali mengalami penurunan di Tahun 2023 yang hanya dapat tumbuh sebesar 2.18%

Penyebab menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pinrang di Tahun 2023 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang dikatakan bahwa Tahun 2023 merupakan tahun yang cukup berat karena faktor cuaca yang ekstrem sangat mempengaruhi pertanian Kabupaten Pinrang. Fenomena Elnino yang berkepanjangan membuat sejumlah komoditi pertanian mengalami penurunan produksi, seperti komoditi tanaman pangan. Kondisi ini diperburuk dengan adanya perbaikan irigasi di beberapa daerah sehingga lahan pertanian tidak dapat ditanami. Selain itu, industri pengolahan tumbuh tidak seoptimis tahun 2022. Sementara mayoritas penduduk Kabupaten Pinrang bekerja di sektor pertanian (32,71 persen) dan manufaktur (22,39 persen).

Sementara dari beberapa komponen yang menjadi pembentuk Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pinrang, dapat dilihat bahwa terdapat 4 Komponen yang dianggap memiliki kontribusi cukup besar diantaranya Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNRT), yang merupakan Komponen

terbesar, kemudian Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) diurutan kedua, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diurutan Ketiga juga Keempat. Adapun perbandingan terhadap sumbangsih masing-masing komponen jika dibanding dengan Tahun 2022, dapat dilihat pada Grafik berikut :

Gambar 1.2
Komponen Pembentuk Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Pinrang Tahun 2022-2023



Sumber : Berita Resmi Statistik Kab Pinrang No. 05/02/7315/Th.IV, 29 Feb 2024

Berdasar pada gambaran tentang komponen pembentuk pertumbuhan Ekonomi disuatu daerah, dapat terlihat besarnya peranan interpersi pemerintah dalam pengelolaan anggaran sehingga dapat mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah sebagaimana ditampilkan pada Grafik 1.2 dimana Pengeluaran Konsumsi Pemerintah menjadi salah satu unsur terbesar dalam memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi ditengah kondisi perekonomian dikategorikan tidak stabil akibat beberapa kondisi yang berdampak pada tingkat produksi masyarakat.

Kondisi inilah yang dipertegas oleh Heni Rahmawati (2022) bahwa pengeluaran pemerintah secara umum dapat dikatakan sangat

berpengaruh dan memberikan dampak terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian disuatu daerah, sebab pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki tujuan khusus yakni menjaga stabilitas perekonomian masyarakat, terutama pada beberapa sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan perekonomian seperti Sektor-Sektor Produksi, Sektor Distribusi, Sektor Konsumsi Masyarakat dan Sektor Keseimbangan Perekonomian.

Besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian masyarakat yang tentunya akan memberi dampak pada Pengukuran PDRB mendapatkan berbagai asumsi terhadap jenis pembelanjaan yang dilakukan, dimana dalam proses penganggaran Keuangan Daerah dikenal dua jensi pembelanjaan utama yakni Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Permasalahan ini juga masih menjadi polemik di Kabupaten Pinrang, dimana belum mampu diperoleh asumsi terhadap jenis belanja mana yang memiliki dampak terhadap pertumbuhan perekonomian sebagai indikator dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Hasil pencermatan yang dilakukan oleh Sumiyarti (2022) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Belanja Langsung atau sering disebut dengan Belanja Modal dan Belanja Tidak Langsung dimana kategorinya adalah semua bentuk belanja diluar belanja modal atau dalam APBD disebut dengan Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa mampu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap

pertumbuhan ekonomi yang berafiliasi pada peningkatan PDRB disuatu daerah, sebab keduanya dinilai mampu memberikan pengaruh terhadap permasalahan kemiskinan di daerah.

Sementara dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rajab dan Muchtar (2023) dan Prisilia Tempone (2020) menunjukkan bahwa unsur Belanja Modal dikatakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat Pertumbuhan Ekonomi yang berafiliasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Bahkan oleh Mustina Ayu (2020) dalam penelitiannya menilai bahwa Belanja Modal dianggap memiliki pengaruh negatif walaupun tidak signifikan terhadap PDRB.

Pandangan berbeda dikemukakan oleh Muh. Resa Saputra (2021) bahwa Belanja Langsung atau Belanja Modal dinyatakan dapat memberikan pengaruh yang signifikan, bahkan diuraikan jika semakin tinggi alokasi belanja modal untuk pembangunan maka akan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat berafiliasi terhadap peningkatan PDRB. Adapun terhadap belanja Tidak Langsung oleh Abdul Rajab (2020) dan Prisilia Tempone (2020) juga menyatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah melalui Belanja Tidak Langsung dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan suatu daerah.

Grafis tentang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pinrang menunjukkan adanya peran besar dari Pengeluaran Pemerintah terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sehingga dapat

berimbang kepada nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah ini, hanya saja secara spesifik unsur pengaruh yang diberikan terhadap pengeluaran pemerintah tersebut jika dikaitkan dengan jenis belanja pada konsep keuangan daerah belum mampu untuk diapresiasi apakah jenis Belanja Langsung atau Tidak Langsung yang mampu memberikan pengaruh.

Berdasar pada kondisi faktual tersebut, kemudian disandingkan dengan beberapa penelitian yang memberikan hasil berbeda tentang pengaruh dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga untuk dapat memastikan nilai pengaruh dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maka fokus kajian dalam penelitian ini akan membahas tentang : “Pengaruh Belanja Langsung Dan Tidak Langsung Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada Pemerintahan Kabupaten Pinrang”

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada fenomena tentang sejauh mana pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam bentuk Belanja Langsung dan Tidak Langsung terhadap Peningkatan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah pengeluaran pemerintah dalam bentuk Belanja Langsung dapat berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Pinrang ?
2. Apakah pengeluaran pemerintah dalam bentuk Belanja Tidak Langsung dapat berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Pinrang ?
3. Apakah pengeluaran pemerintah dalam bentuk Belanja Langsung dan Tidak Langsung jika secara bersama-sama berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Pinrang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dalam bentuk Belanja Langsung terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dalam bentuk Belanja Tidak Langsung terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dalam bentuk Belanja Langsung dan Tidak Langsung jika secara bersama-sama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah dukungan konseptual sekaligus sebagai sarana untuk memberikan gambaran tentang pengaruh pengeluaran pemerintah dalam bentuk Belanja Langsung dan Tidak Langsung terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Pinrang
- b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu sumber rujukan terhadap penelitian-penelitian yang mengkaji tentang hubungan pengaruh antara Belanja Langsung dan Tidak Langsung terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi khususnya berkaitan dengan manfaat Belanja Langsung dan Tidak Langsung terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah
- b. Informasi yang disajikan dalam penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi sumber rujukan bagi Pemerintah Daerah untuk dapat mengetahui bentuk pengeluaran yang dapat memberikan pengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pemerintah Daerah

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yakni “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang”, dijadikan dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah.

Pemerintahan daerah sesuai Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan. Adapun tujuan dari pembentukan pemerintahan di daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal.

b. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 5 ayat (4) menyebutkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah didasarkan pada beberapa asas yakni :

- 1) Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah, atau penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.
- 2) Dekonsentrasi dapat dijabarkan sebagai bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah.
- 3) Tugas Pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari pemerintah kepada daerah dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota.

c. Keuangan Daerah

Unsur yang memiliki peran penting dan dominan dalam mengukur tingkat kemampaun daerah dalam melaksanakan

otonominya yakni pada sektor keuangan. Melalui kemampuan keuangan yang dimiliki oleh sebuah daerah menjadi penentu terhadap bentuk dan ragam kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu kriteria penting mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dapat dilihat dari tingkat kemampuan atau *self supporting* khususnya dibidang keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk jenis kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Merujuk pada pengertian tersebut Abdul Halim dan Muhammad Iqbal (2019) mengemukakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain

Keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam usaha pemerintah daerah mengisi kas daerah. Hak pemerintah Daerah tersebut meliputi hak menarik pajak daerah; hak untuk menarik retribusi/iuran daerah; hak mengadakan pinjaman, dan hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pusat (Mulyana, B; 2020)

d. Anggaran Sektor Publik

Anggaran menurut Halim dan Kusufi (2019) adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Sejalan dengan pendapat tersebut anggaran menurut Faud, M dkk (2020) adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *financial*, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, dan sosial) memiliki cara pandang yang berbeda-beda.

Pengertian sektor publik yang dipandang dari sudut ilmu Ekonomi menurut Mardiasmo (2021) adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Sehingga berdasarkan pandangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa anggaran sektor publik oleh Mahmudi (2019) diuraikan sebagai suatu kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Sedangkan Nordiawan (2019) mengemukakan bahwa Anggaran Sektor Publik adalah sebuah rencana finansial yang menyatakan hal-hal yang berkaitan dengan rencana-rencana organisasi sektor publik untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa APBD adalah rencana keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah, disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 Tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengatur landasan administratif yang dapat dijadikan sebagai dalam pengelolaan anggaran daerah antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat asas.

Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pasal 8 menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Pada aturan ini juga diuraikan bahwa anggaran kinerja adalah suatu sistem penganggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau

output dari perencanaan alokasi biaya (belanja) atau *input* yang ditetapkan. Anggaran kinerja harus menunjukkan tujuan suatu pengeluaran, biaya dari 'program' yang diusulkan untuk mencapai tujuan tersebut, dan ukuran serta hasil dari setiap program tersebut.

Selanjutnya pada Pasal 21 juga dijelaskan bahwa dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati bersama sebagai pedoman dalam penyusunan APBD

b. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan menguraikan bahwa Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi dari Struktur APBD berdasarkan urusan pemerintahan dan organisasi terdiri dari :

1) Pendapatan Daerah

Pasal 1 angka 7 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, meliputi :

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Struktur Pendapatan Asli Daerah sesuai yang diatur dalam Pasal 31 angka 7 sampai 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah yaitu semua pendapatan yang bukan berasal dari pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah dan dipungut serta disetorkan ke kas daerah dalam tahun anggaran berjalan.

b) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan desentralisasi Struktur Dana Perimbangan pada APBD sesuai bunyi Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dibandingkan dengan Struktur APBD pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.1
Struktur Dana Perimbangan Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

PP Nomor 58 Tahun 2005	PP Nomor 12 Tahun 2019
I. Transfer Ke Daerah	I. Transfer Ke Daerah
A. Dana Perimbangan	A. Dana Perimbangan
1. Dana Bagi Hasil.	1. Dana Transfer Umum
2. Dana Alokasi Umum	(<i>General Purpose Grant</i>)
3. Dana Alokasi Khusus	a. Dana Bagi Hasil.

1) DAK Reguler	b. Dana Alokasi Umum
2) DAK Tambahan	2. Dana Transfer Khusus
a) DAK Afirmasi	(<i>Specific Purpose Grant</i>)
b) DAK PJK 2	a. DAK Fisik
3) DAK Usulan Daerah yang disetujui DPR	1) DAK Reguler
	2) DAK Infrastruktur Publik Daerah
B. Dana Otonomi Khusus	3) DAK Afirmasi
C. Dana Keistimewaan	b. DAK Non Fisik
D. Dana Transfer Lainnya	1) Dana BOS
1. Tunjangan Profesi Guru (PNSD)	2) Dana BOP PAUD
2. BOS	3) Dana TPG PNSD
3. Tamsil PNSD	4) Dana Tamsil PNSD
4. Dana P2D2	5) Dana P2D2
5. Dana Insentif Daerah	6) Dana BOK
	7) Dana PK2 UKM dan Ketenagakerjaan
	B. Dana Insentif Daerah
	C. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan
II. Dana Desa	II. Dana Desa
	III. Dana Transfer Antar Daerah
	A. Pendapatan Bagi Hasil
	B. Bantuan Keuangan

Sumber : PP Nomor 58 Tahun 2005 dan PP Nomor 12 Tahun 2019

c) Transfer Antar Daerah

Salah satu bentuk kebijakan yang diatur secara tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, walaupun masih tergolong dalam

kategori dana transfer namun dipisahkan dari nomenklatur Dana Perimbangan yakni Transfer Antar Daerah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 30 dan Pasal 34 aturan ini. Adapun perbandingan unsur yang dimasukkan dalam Transfer antar daerah yakni : pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

d) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Adapun jenis pendapatan yang dikategorikan ke dalam Lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan bunyi Pasal 46-48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yakni : Pendapatan Hibah, Dana Darurat (Bencana Alam) dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, atau Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Perbedaan Kebijakan terhadap Belanja Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 di banding dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2
Belanja Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Kalisifikasi Belanja Daerah terdiri atas	Kalisifikasi Belanja Daerah terdiri atas :
1. Belanja Pegawai;	1. Belanja Operasi (Belanja Tidak Langsung), dirinci atas :
2. Belanja Barang dan Jasa;	a. Belanja Pegawai;
3. Belanja Modal;	b. Belanja Barang dan Jasa;
4. Bunga;	c. Belanja Bunga;
5. Belanja Subsidi;	d. Belanja Subsidi;
6. Belanja Hibah;	e. Belanja Hibah;
7. Belanja Bantuan Sosial;	f. Belanja Bantuan Sosial
8. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;	2. Belanja Modal (Belanja Langsung);
9. Belanja Tidak Terduga.	3. Belanja Tidak Terduga
	4. Belanja Transfer, dirinci atas :
	a. Belanja Hibah
	b. Belanja Bantuan keuangan

Sumber : PP Nomor 58 Tahun 2005 dan PP Nomor 12 Tahun 201

3. Belanja Daerah

a. Pengertian Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada bagian PSAP No. 2 menyatakan bahwa pengertian Belanja adalah Semua bentuk pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun

anggaran bersangkutan yang pembayarannya tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah”.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas.

Bastian (2019) menyatakan bahwa belanja daerah berbeda dengan pengeluaran daerah sebab tidak semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga menyebabkan berkurangnya Saldo di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dikategorikan sebagai belanja. Namun setiap belanja merupakan pengeluaran pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka jenis Pembelanjaan yang dikelola oleh Pemerintah sesuai sifatnya dibagi menjadi beberapa jenis yakni :

- 1) Belanja Operasi
 - a) Belanja Pegawai;

- b) Belanja Barang dan Jasa;
- c) Belanja Bunga;
- d) Belanja Subsidi;
- e) Belanja Hibah;
- f) Belanja Bantuan Sosial

2) Belanja Modal

Adalah Bentuk Pembelanjaan yang melibatkan pihak ketiga sebagai pelaksana program

b. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung menurut Bastian (2019) adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi :

1) Belanja Pegawai

Belanja yang berbentuk seperti gaji dan tunjangan serta penghasilan dari yang lainnya diberikan kepada pegawai negeri sipil sesuai perundang-undangan yang berlaku

2) Belanja Barang Dan Jasa

Bentuk pengeluaran dalam hal pembelian atau pengadaan barang yang memiliki nilai manfaat kurang dari setahun, dalam pemakaian jasa untuk melaksanakan kegiatan daerah, Belanja Barang dan Jasa juga meliputi Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat

3) Belanja Bunga

Bentuk belanja yang digunakan dalam penganggaran pembayaran berupa bunga utang yang sudah dihitung sesuai kewajiban pokok utang dalam bentuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang

4) Belanja Subsidi

Bentuk belanja yang sudah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu tujuannya agar harga jual atau produksi barang dapat terjangkau oleh masyarakat.

5) Belanja Hibah

Belanja yang sudah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah

6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja yang sudah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Belanja Langsung

Belanja yang dianggarkan untuk kegiatan secara langsung dalam hal pelaksanaan program. Secara umum Belanja ini seiring diistilahkan dengan Belanja Modal yakni Belanja Pembangunan

4. Produk Domestik Regional Bruto

a. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Siregar (2021) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan suatu wilayah, khususnya di bidang ekonomi dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat didefinisikan sebagai tingkat (besarnya) pendapatan masyarakat pada wilayah, dimana tingkat pendapatan regional dapat diukur dari total pendapatan wilayah atau pendapatan rata-rata masyarakat pada daerah tersebut. (Priyarsono, DS. 2019)

Sementara penjabaran dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan uraian dari Badan Pusat Statistik (2022) adalah jumlah nilai tambah Bruto (*Gross Value Added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun ataupun dalam tiga bulan atau semesteran. Sedangkan nilai tambah adalah nilai produksi (*Output*) dikurangi dengan biaya antara (*Intermediate Cost*).

Terhadap Nilai tambah Bruto berdasarkan pandangan dari Arsyad, L. (2022) mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa, dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan

menghitung nilai tambah bruto dari masing- masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan menghasilkan PDRB atas dasar harga pasar.

b. Fungsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sadono, Sukirno (2021) mengemukakan bahwa fungsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bagi suatu wilayah adalah :

- 1) Menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah, nilai PDRB yang besar menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya ekonomi daerah tersebut juga besar.
- 2) Menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh seluruh penduduk suatu daerah
- 3) Digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun.
- 4) PDRB menurut sektor menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peran sektor perekonomian dalam suatu wilayah, sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
- 5) PDRB menurut penggunaan menunjukkan bagaimana produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar.

- 6) Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan menurut barang dan jasa yang dihasilkan sektor ekonomi.
- 7) PDRB menurut penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk pengukuran terhadap laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri maupun perdagangan antar pulau atau provinsi.
- 8) PDRB dan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan PDRB perkapita atau peratu orang.
- 9) PDRB dan PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita

c. Pendekatan Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menggambarkan kemampuan dari suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor produksi tersebut menyebabkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bervariasi antar daerah. Oleh karena itu, nilai PDRB yang dihasilkan antar daerah bergantung kepada potensi faktor produksi daerah tersebut.

Mekanisme sederhana dalam mendapatkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yakni dengan membagi PDRB dan Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Yang Tinggal Disuatu Wilayah maka akan diperoleh angka PDRB Per Kapita. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut ditunjukkan dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (Purba, B. 2021).

Badan Pusat Statistik (BPS-2022) dalam melakukan perhitungan mendapatkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah diperoleh melalui 3 (Tiga) jenis pendekatan yakni :

1) Pendekatan Pendapatan

PDRB jika berdasarkan pendekatan pendapatan dilakukan dengan menghitung jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Balas jasa yang dimaksud adalah sewa tanah, upah dan gaji, keuntungan dan bunga modal. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak

lainya. Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disusun dalam dua bentuk, yaitu:

a) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan

PDRB Atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi, pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap.

PDRB atas dasar Harga Konstan menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu (disebut tahun dasar).

Berdasarkan perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya pada suatu wilayah atau daerah melalui Nilai Produk Domestik Regional Bruto riil atau sesuai kondisi yang sebenarnya.

b) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB atas dasar Harga Berlaku adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah.

PDRB atas dasar Harga Berlaku menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun

berjalan. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi

2) Pendekatan Pengeluaran

Perolehan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pendekatan pengeluaran adalah hasil penjumlahan permintaan akhir dari semua komponen, yang terdiri dari:

- a) Impor Netto
- b) Ekspor Netto (Ekspor Dikurangi Impor)
- c) Perubahan Stok
- d) Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, Dalam Jangka Waktu Tertentu (Biasanya Satu Tahun)
- e) Konsumsi Pemerintah
- f) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Dan Lembaga Swasta Yang Tidak Mencari Untung (Nirlaba)

3) Pendekatan Produksi

Cara perhitungan pendapatan PDRB menurut pendekatan produksi adalah dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang dihasilkan dari sektor-sektor produktif. Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini disebut juga penghitungan melalui pendekatan nilai tambah (*Value Added*).

Pendekatan produksi adalah penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan sektor ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara dari total produksi bruto sektor atau sub sektor tersebut

Nilai tambah merupakan selisih antar nilai produksi dan nilai biaya antara.

Biaya antara adalah nilai barang dan jasa yang digunakan sebagai input antara dalam proses produksi. Barang dan jasa yang termasuk input antara adalah bahan baku atau bahan penolong yang biasanya habis dalam sekali proses produksi atau mempunyai umur penggunaan kurang dari setahun.

Sementara itu pengeluaran atau balas jasa faktor produksi seperti upah dan gaji, sewa tanah, bunga, modal, dan keuntungan yang diterima perusahaan bukan termasuk biaya antara. Begitu juga dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto bukan merupakan biaya antara.

PDRB menurut Pendekatan Produksi dimana unit-unit produksi yang dimaksud dikelompokkan menjadi Sembilan Sektor dan Lapangan Usaha, yaitu:

- a) Perdagangan,
- b) Hotel dan Restoran
- c) Bangunan dan Konstruksi

- d) Listrik, Gas, dan Air Bersih
- e) Industri Pengolahan
- f) Pertambangan dan Penggalian
- g) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
- h) Jasa Keuangan, Real Estate (Persewaan) dan Jasa Perusahaan
- i) Jasa-Jasa Lainnya

5. Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi menurut pandangan dari Sadono (2021) dapat diartikan sebagai suatu perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang dihasilkan bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Sedangkan Purba (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan *output* yang menunjukkan nilai pertumbuhan suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, artinya dengan asumsi bahwa semakin meningkatnya ketersediaan infra struktur di daerah maka diharapkan dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat khususnya dari segi pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun untuk menentukan ukuran pendapatan riil masyarakat tersebut maka indikator yang digunakan yakni tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Berdasar pada penjelasan tersebut maka Priyarsono, DS. (2019) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dari suatu Wilayah atau Daerah dapat diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB ADHK tahun ini}}{\text{PDRB ADHK tahun sebelumnya}} \times 100 \%$$

b. Komponen Utama Dalam Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan sebuah peningkatan hasil atau *output* masyarakat yang disebabkan oleh, semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat. Olehnya itu menurut Sukamiati, Lestari et. all (2021) terdapat 3 Komponen Utama yang menjadi pembentuk terhadap suatu pertumbuhan ekonomi pada sebuah wilayah yakni :

- 1) Akumulasi Modal (*Capital Accumulation*), meliputi semua bentuk investasi atau investasi baru dengan tujuan untuk meningkatkan *output* dan modal manusia atau Sumber Daya Manusia (*Human Capital*) dalam mendukung

peningkatan produktivitas Sumber Daya Alam melalui investasi strategis.

- 2) Akumulasi Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja, dimana pertumbuhan penduduk yang berkembang berarti ukuran pasar domestiknya juga akan besar sedangkan dengan berkembangnya jumlah tenaga kerja maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang produktif.
- 3) Akumulasi Kemajuan Teknologi (*Technologi Progress*), merupakan sumber utama di dalam pertumbuhan ekonomi. Pengertian yang sederhana terhadap kemajuan teknologi dimana dengan kemajuan tersebut artinya terdapat penemuan baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan- pekerjaan tradisional. Ada tiga klasifikasi kemajuan teknologi diantaranya yaitu : Kemajuan Teknologi yang Netral (*Neutral Technologi Progress*), Kemajuan Teknologi yang Hemat Tenaga Kerja (*Laborsaving Technological Progress*), dan Kemajuan Teknologi Hemat Modal (*Capital-Saving Technological Progress*)

c. Ciri-Ciri Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno (2021), menguraikan bahwa terdapat enam ciri yang sering dimunculkan dalam sebuah analisis berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dan memiliki

keterikatan satu dengan lainnya. Keenam ciri tersebut antara lain :

- 1) Laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan produk per kapita yang tinggi.
- 2) Peningkatan produktifitas yang ditandai dengan meningkatnya laju produk perkapita.
- 3) Laju perubahan struktural yang tinggi dimana hal ini mencakup kegiatan pertanian ke non pertanian, dari industri ke jasa dan peralihan usaha-usaha perorangan menjadi perusahaan yang berbadan hukum serta perubahan status kerja buruh.
- 4) Urbanisasi meningkat.
- 5) Ekspansi dari wilayah lain.
- 6) Peningkatan arus barang modal dan orang antar bangsa

d. Proses Pertumbuhan Ekonomi

Elfindri, dkk. (2019) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi proses bertumbuhnya sebuah perekonomian pada suatu daerah, diantaranya adalah dari faktor ekonomi itu sendiri dan faktor dari luar aspek ekonomi, selain itu, sebuah pertumbuhan ekonomi tentunya harus pula ditopang oleh kualitas sumber daya yang ada pada suatu wilayah seperti Sumber Daya Alam, Manusia, Usaha, Teknologi, Modal dan lainnya.

Penjabaran terhadap masing-masing faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Faktor Ekonomi

Faktor produksi dianggap sebagai elemen penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Adapun faktor-faktor produksi yang dimaksud antara lain :

a) Sumber Daya Alam (SDA)

Alam merupakan kekayaan yang hadir secara naluriah yang dimiliki oleh sebuah wilayah. Sehingga sumber daya alam dapat menjadi penopang bagi sebuah wilayah dalam mengupayakan perbaikan kondisi perekonomiannya.

b) Akumulasi Modal

Modal merupakan salah satu faktor produksi yang menjadi penyangga utama terhadap keberlangsungan sebuah kegiatan ekonomi. Terhadap Pembentukan modal maka hal yang tidak dapat dihindari adalah sebuah pengorbanan dengan mengurangi pola konsumtif, sehingga keberlangsungan terhadap suatu usaha akan dapat berlangsung lama.

c) Organisasi

Mendukung keberlangsungan sebuah faktor produksi, maka sangat dibutuhkan keberadaan wadah atau

organisasi untuk menjalankan fungsi dari unsur-unsur pendukung dari sebuah faktor produksi.

Tanpa sebuah organisasi atau perusahaan, maka sebuah kegiatan perekonomian akan terhambat produktivitasnya dan kehilangan wadah untuk memproduksi.

d) Kemajuan Teknologi

Teknologi dapat memberikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan segala aspek, sebab dengan adanya perkembangan teknologi tentu akan menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Karena Kemajuan Teknologi dapat memudahkan proses produksi sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi.

e) Pembagian Kerja Dan Skala Produksi

Setiap individu memiliki skill dan kompetensi yang tidak serupa, sehingga tidak mungkin segala bentuk pekerjaan yang berbeda-beda dapat dikelola oleh satu orang dan tentunya akan berdampak tingkat efisiensi kerja dari mereka.

Untuk mengurangi ketidakefisienan proses dan hasil kerja, maka diperlukan spesialisasi kerja bagi masing masing karyawan.

2) Faktor Non-Ekonomi

Tidak hanya dari faktor ekonomi yang dianggap dapat memberikan pengaruh terhadap sebuah pertumbuhan, namun terdapat pula beberapa hal yang tidak termasuk ke dalam aspek ekonomi namun juga mampu mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi, diantaranya adalah :

a) Faktor Sosial dan Budaya

Kondisi sosial dan budaya dari suatu daerah juga dapat dianggap sebagai faktor yang mendukung sebuah kegiatan perekonomian. Hal tersebut dikarenakan dapat membentuk pandangan, struktural sosial, serta harapan yang dimiliki oleh masing-masing individu atau masyarakat.

b) Faktor Sumber Daya Manusia

c) Kualitas input tenaga kerja, atau sumber daya manusia merupakan faktor-faktor terpenting bagi keberhasilan ekonomi.

d) Faktor Politik Dan Administratif

Kondisi politik dan administratif sebuah daerah selain dapat menjadi penentu juga bisa menjadi faktor penghambat terhadap proses pertumbuhan ekonomi.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dianggap memiliki relevansi terhadap kajian

tentang Pengaruh Belanja Langsung Dan Tidak Langsung Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pada Pemerintahan Kabupaten Pinrang, yakni :

Parno, Daru Tri Rekso Joko Nuryanto. (2023), dengan judul penelitiannya yakni “Hubungan Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Kalimantan Melalui Pendekatan *Stochastic Frontier Analysis*”. Adapun dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dalam mendukung peningkatan PDRB di setiap daerah, maka perilaku efisiensi anggaran merupakan tindakan yang wajar dilakukan untuk mengoptimalkan arah kebijakan pembangunan, akan tetapi terhadap permasalahan efisiensi tersebut arah kebijakannya lebih diutamakan pada konsep pembangunan yang dapat memberikan imbas kepada kesejahteraan masyarakat

Abdul Rajab (2022), dengan Judul Penelitiannya yakni “Pengaruh Belanja Tidak Langsung Terhadap Produk Domestik Regional Bruto”. Adapun dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Ada pengaruh Belanja Tidak Langsung terhadap Produk Domestik Regional Bruto. hal ini disebabkan karena belanja tidak langsung yang didalamnya terdapat alokasi belanja untuk belanja pegawai dimana pendapatan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga semakin meningkat pendapatan pegawai maka belanja kebutuhannya juga akan meningkat dan tentunya hal ini akan berdampak terhadap peningkatan produk domestik regional bruto.

Heni Rahmawati (2022), dengan Judul Penelitiannya yakni “Analisis Fungsi Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur”. Adapun dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Hal ini dikarenakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah secara langsung mendukung kegiatan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seperti pembangunan infrastruktur yang mempermudah distribusi produk baik berupa barang ataupun jasa, dengan demikian pertumbuhan ekonomi masyarakat akan semakin baik

Sumiyarti (2022), dengan Judul Penelitiannya yakni “Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan”. Adapun dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa aktifitas ekonomi yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dipengaruhi melalui instrumen belanja langsung seperti belanja modal dan belanja tidak langsung berupa belanja bantuan sosial

Abdul Rajab, Muchtar (2023), dengan Judul Penelitiannya yakni “Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat PDRB Provinsi Sulawesi Barat”. Adapun dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Tidak ada pengaruh Belanja Modal terhadap produk domestik regional bruto. Belanja modal ini tidak berpengaruh signifikan karena belanja modal hanya berorientasi pada pembelian

asset daerah maupun perawatan asset daerah yang secara langsung tidak begitu berhubungan terhadap kegiatan konsumsi barang maupun jasa secara langsung, sehingga tidak berdampak pada perputaran uang dimasyarakat

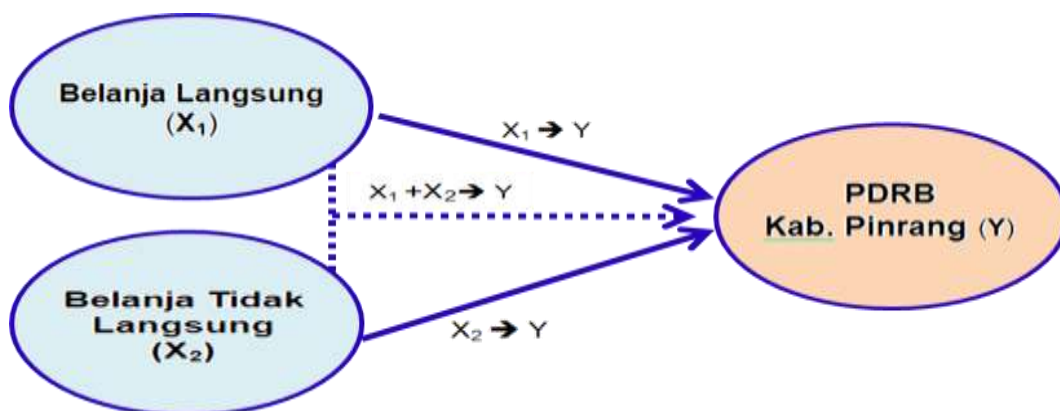
Mustina Ayu (2020), dengan Judul Penelitiannya yakni “Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang, Dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018”. Adapun dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Belanja Modal dianggap memiliki pengaruh negatif walaupun tidak signifikan terhadap PDRB

Prisilia Tempone, Josep B. Kalangi, Hanly Fendy DJ, Siwu (2020), dengan Judul Penelitiannya yakni “Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro”. Adapun dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa hanya belanja tidak langsung saja yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan Belanja Langsung tidak berpengaruh. Hal ini memberi indikasi bahwa alokasi anggaran belanja langsung pemerintah belum banyak memberi pengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi padahal melalui alokasi belanja langsung inilah pemerintah punya peran besar meningkatkan perekonomian melalui pengalokasian anggaran pembangunan atau infrastruktur agar laju perekonomian dapat meningkat.

D. Kerangka Konseptual

Berdasar pada rumusan masalah yang akan dianalisis dalam Kajian ini, maka kerangka konseptual yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan

- $X_1 \rightarrow Y$: Pengaruh pengeluaran pemerintah dalam bentuk Belanja Langsung dapat berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Pinrang
- $X_2 \rightarrow Y$: Pengaruh pengeluaran pemerintah dalam bentuk Belanja Tidak Langsung dapat berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Pinrang
- $(X_1 + X_2) \rightarrow Y$: Pengaruh pengeluaran pemerintah dalam bentuk Belanja Langsung dan Tidak Langsung secara bersama-sama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Pinrang

E. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini berdasar pada rumusan masalah yakni :

1. H_0 = Diduga Pengeluaran Pemerintah dalam bentuk Belanja Langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Pinrang

- H_a = Diduga Pengeluaran Pemerintah dalam bentuk Belanja Langsung berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Pinrang
2. H_0 = Diduga Pengeluaran Pemerintah dalam bentuk Belanja Tidak Langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Pinrang.
- H_a = Diduga Pengeluaran Pemerintah dalam bentuk Belanja Tidak Langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Pinrang
3. H_0 = Diduga Pengeluaran Pemerintah dalam bentuk Belanja Langsung dan Tidak Langsung jika secara bersama-sama Tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Pinrang.
- H_a = Diduga Pengeluaran Pemerintah dalam bentuk Belanja Langsung dan Tidak Langsung jika secara bersama-sama dapat berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Pinrang

Dasar Pengambilan Keputusan untuk Uji Hipotesis dalam penelitian ini adalah

1. H_0 diterima dan H_a di tolak jika nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau nilai Sig hasil analisis > Sig (α) = 0.05
2. H_0 ditolak dan H_a diterima jika nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau nilai Sig hasil analisis < Sig (α) = 0.05

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menurut Sukandarrumidi (2018) adalah sebuah metode utama yang digunakan peneliti untuk mencapai

tujuan, juga demi menentukan jawaban atas permasalahan yang diajukan. Berdasar pada penjelasan tersebut sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini maka pendekatan yang dipilih yakni melalui metode kuantitatif, dimana menurut Sugiyono (2020) bahwa Metode Kuantitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian sosial yang dapat mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Pemilihan lokasi penelitian menurut Sugiyono (2020) harus didasarkan pada beberapa pertimbangan-pertimbangan antara lain kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih sehingga nantinya penelitian akan memperoleh atau menemukan hal-hal yang bermakna dan baru.

Mempertimbangkan teori tersebut dengan menyesuaikan permasalahan yang akan dikaji maka lokasi pada penelitian ini adalah Pemerintah Daerah dan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang

2. Waktu Penelitian

Sesuai dengan estimasi waktu yang direncanakan, dimulai dari tahapan perencanaan penelitian, pengambilan, pengolahan dan analisis data, maka untuk melakukan waktu penelitian yang digunakan selama 3 (Tiga) bulan dan dijadwalkan pada bulan Desember 2023 sampai dengan Februari 2024

C. Jenis dan Sumber Data

Data secara umum dapat diartikan sebagai kumpulan dari fakta yang bisa berbentuk angka, simbol, maupun tulisan yang diperoleh melalui subjek penelitian dan bisa dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, dimana sumbernya dapat diperoleh dari manapun yang terpercaya. (Arikunto, 2020).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah Kuantitatif yakni data berwujud angka atau bilangan yang diperoleh dari hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berupa Belanja Langsung dan Tidak Langsung serta hasil analisis terhadap Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang. Sehingga dapat dikatakan bahwa jenis data jika merujuk pada sumbernya digolongkan sebagai Data Skunder.

Merujuk pada sifat dari data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Laporan Keuangan dan Hasil Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk Rentang Waktu antara Tahun 2012 hingga Tahun 2022, maka menurut Sugiyono (2020)

bahwa pendekatan analisis yang dapat digunakan yakni dengan pendekatan model analisis Deret Waktu atau Time Series.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2020) merupakan langkah strategis yang dapat digunakan dalam sebuah penelitian, sebab salah satu tujuan utama dari sebuah penelitian adalah pengumpulan data. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode antara lain :

1. Metode Dokumentasi

Berdasarkan jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian sifatnya skunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Dokumentasi yaitu dengan cara mengakses Situs Resmi Badan Pusat Statistik berkaitan dengan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta mengakses Data Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang untuk masa 15 Tahun.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mempelajari sumber-sumber berupa tulisan-tulisan atau buku-buku serta kajian-kajian yang berhubungan dengan penelitin. Adapun metode yang digunakan yakni : Pengkajian sumber rujukan (Buku dan Referensi) dan Pengumpulan data berupa

jurnal atau berita yang dianggap dapat mendukung kajian penelitian melalui jaringan internet.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2020) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Pada penelitian ini populasi yang dimaksudkan adalah APBD dan Data Statistik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang selama 15 Tahun (2009-2023).

2. Teknik Pengambilan Sampling

Sampel dapat diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* yakni teknik pengambilan sampel sesuai kriteria yang akan digunakan dalam penelitian (Sugiyono 2020).

3. Penentuan Jumlah Sampel

Penentuan jumlah sampel tentunya harus memperhatikan alat analisis yang digunakan, dimana penelitian menggunakan Data Time Series dan akan dianalisis melalui SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*), sehingga jumlah sampel yang digunakan untuk masing-masing indikator merujuk pada ruang lingkup waktu terhadap data yang diukur. Olehnya itu agar dalam

penelitian ini dapat diperoleh hasil yang akurat maka tenggang waktu data yang digunakan yakni 15 Tahun.

F. Definisi Operasional

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa variabel dalam penelitian ini di bagi kedalam 2 (dua) kelompok yakni Variabel Bebas yang terdiri dari Belanja Langsung-(X1), dan Belanja Tidak Langsung-(X2), sedangkan untuk Variable Terikat atau Variabel Endogen adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)-(Y)

1. *Variabel Bebas* atau *Variabel Independen*

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan pada variabel dependen (Sugiyono, 2020) Adapun Variable Bebas dalam penelitian ini adalah :

a. Belanja Langsung-(X1)

Belanja Langsung atau Belanja Modal adalah belanja yang dianggarkan untuk kegiatan secara langsung dalam hal pelaksanaan program belanja Pembangunan.

b. Belanja Tidak Langsung-(X2)

Belanja Tidak Langsung dapat diartikan sebagai bentuk pembelanjaan yang telah dianggarkan namun tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi :

1) Belanja Pegawai

Belanja yang berbentuk seperti gaji dan tunjangan serta penghasilan dari yang lainnya diberikan kepada pegawai negeri sipil sesuai perundang-undangan yang berlaku.

2) Belanja Barang Dan Jasa

Bentuk pengeluaran dalam hal pembelian atau pengadaan barang yang memiliki nilai manfaat kurang dari setahun, dalam pemakaian jasa untuk melaksanakan kegiatan daerah, Belanja Barang dan Jasa juga meliputi Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.

3) Belanja Bunga

Bentuk belanja yang untuk pembayaran bunga utang yang sudah dihitung sesuai kewajiban pokok utang dalam bentuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

4) Belanja Subsidi

Bentuk belanja untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu tujuannya agar harga jual atau produksi barang dapat terjangkau oleh masyarakat.

5) Belanja Hibah

Belanja yang sudah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah.

6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja yang dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Variable Terikat atau Variabel *Dependen*

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen atau sering disebut sebagai variabel terikat. Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas.

Variabel Terikat pada penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)-(Y) yang merupakan ukuran keberhasilan pembangunan suatu wilayah, khususnya di bidang ekonomi dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah

Badan Pusat Statistik (BPS-2022) dalam melakukan perhitungan mendapatkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah diperoleh melalui 3 (Tiga) jenis pendekatan yakni :

a. Pendekatan Pendapatan

PDRB jika berdasarkan pendekatan pendapatan dilakukan dengan menghitung jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

b. Pendekatan Pengeluaran

Perolehan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pendekatan pengeluaran adalah hasil penjumlahan permintaan akhir dari semua komponen.

c. Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi adalah penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan/ sektor ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara dari total produksi bruto sektor atau sub sektor tersebut.

Nilai tambah merupakan selisih antar nilai produksi dan nilai biaya antara.

G. Teknik Analisis Data

1. Alat Analisis Data

Data Time Series yang telah dimodifikasi menjadi Skala Likert selanjutnya akan dianalisis dengan dengan pendekatan SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) melalui Software IBM SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) Versi 25.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas menurut Imam Ghozali (2018) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual

mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid.

Pengujian untuk uji normalitas data dilakukan melalui analisis *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov*, dengan dasar pengambilan keputusan menurut Singgih Santoso (2018) dilakukan dengan membandingkan antara nilai probabilitas (*Asymtotic Significance*) dan nilai Signifikansi 0,05, Sehingga dasar pengambilan keputusan terhadap uji normalitas ini adalah :

- 1) Jika $\text{Asymp.Sig.}(2\text{-tailed}) > 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian terdistribusi normal.
- 2) Jika $\text{Asymp.Sig.}(2\text{-tailed}) < 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian dinyatakan tidak terdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi menurut Sujarweni (2020) digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena adanya problem yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Untuk melihat atau mendeteksi apakah terjadi gejala autokorelasi maka model yang digunakan adalah Uji Durbin-Watson (DW Test).

Adapun metode untuk dapat memperoleh nilai d-Tabel maka rumus yang digunakan adalah $(k' ; N)$. dimana k adalah jumlah variabel independen sementara N adalah jumlah sampel. Apabila diasumsikan jumlah variabel independen ada 2 dan jumlah sampel 10 maka untuk Nilai d-Tabel diperoleh dengan melihat pada kolom $K=2$ nilai tabel durbin watson pada signifikansi 5% dan pada baris $N=10$, dari sinilah nantinya akan diperoleh nilai d_U dan d_L . Sehingga untuk dasar pengambilan keputusan terhadap Uji Autokorelasi adalah :

- 1) Jika $0 < d < d_L$, berarti ada Autokorelasi Positif
- 2) Jika $4 - d_L < d < 4$, berarti ada Auto Korelasi Negative
- 3) Jika $2 < d < 4 - d_U$ atau $d_U < d < 2$, berarti tidak ada Autokorelasi Positif Atau Negatif
- 4) Jika $d_L \leq d \leq d_U$ atau $4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$, pengujian tidak meyakinkan. Untuk itu dapat digunakan uji lain atau menambah data
- 5) Jika nilai $d_U < d < 4 - d_U$ maka tidak terjadi autokorelasi

c. Uji Multikolienaritas

Uji Multikolienaritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model (Sujarweni, 2020).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolienaritas sebagai berikut:

- 1) Nilai Tolerance $> 0,10$ dan Nilai *Variance Inflanction Factor* (VIF) < 10 menunjukkan bahwa tidak terjadi adanya Multikolinearitas antar variabel independen
- 2) Nilai tolerance $< 0,10$ dan nilai variance inflanction factor (VIF) > 10 menunjukkan adanya Multikolinearitas antar variable independen.

d. Uji Heteroskidastisitas

Uji *Heteroskedastisitas* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi *Homoskedastisitas* atau *Heteroskedastisitas* antara variance residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap

Menguji apakah antara Variance yang digunakan dalam sebuah penelitian tidak terjadi hubungan *Heteroskedastisitas*, jika metode yang digunakan adalah *Scaterplot Regresi*, menurut Ghozali (2018) persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
- 2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.

- 3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- 4) Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda menurut Imam Ghozali (2018) digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel Independen terhadap variabel dependen. Selain itu juga analisis regresi digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

Adapun persamaan untuk melakukan Analisis Regresi Linear Berganda yakni :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Di mana:

Y	=	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
X1	=	Belanja Langsung
X2	=	Belanja Tidak Langsung
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisien Regresi Variabel Independen
a	=	Konstanta

Dasar pernyataan terhadap hasil analisis regresi linear berganda dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Terhadap Nilai Konstanta yang diperoleh menunjukkan tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Kabupaten Pinrang, sehingga jika nilai koefisien regresi untuk Belanja Langsung dan Tidak Langsung memiliki nilai 0, maka dapat dinyatakan bahwa nilai PDRB pada Kabupaten Pinrang sebesar Nilai Konstanta yang diperoleh.

- b. Berdasarkan persamaan koefisien regresi menunjukan bahwa Belanja Langsung dan Tidak Langsung, mempunyai arah regresi positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Kabupaten Pinrang sebagaimana ditunjukkan pada nilai β_1 , β_2 , β_3 , yang berarti bahwa apabila Belanja Langsung dan Tidak Langsung mengalami peningkatan 1 point maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Kabupaten Pinrang dinyatakan meningkat sebesar persentase dari nilai yang dapat dilihat pada nilai β_1 , β_2 , β_3 , dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain konstan

4. Uji Hipotesis

Untuk menilai ketepatan fungsi regresi berdasarkan sampel yang digunakan dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari nilai statistik t dan F. adapun penjelasan Uji T atau Uji Parsial dan Uji F atau Uji Simultan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Uji T (Uji Parsial)

Uji t atau *One Sample Test* bertujuan untuk mengetahui hubungan pengaruh antara variable yang dihipotesiskan, menurut Sugiyono (2020) bahwa dasar pengambilan keputusannya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni :

4. Berdasarkan Nilai Signifikansi (0,05)

- a) Jika diperoleh Nilai Signifikansi $>$ Nilai Sig $\alpha = 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak artinya antara Variabel Independen tidak

memiliki hubungan yang signifikan terhadap Variabel Dependen.

- b) Jika diperoleh Nilai Signifikansi < Nilai Sig $\alpha = 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya antara Variabel Independen memiliki hubungan yang signifikan terhadap Variabel Dependen

5. Memperbandingkan Nilai t_{Hitung} dengan Nilai t_{Tabel}

- a) Jika diperoleh Nilai t_{Hitung} sesuai hasil analisis < Nilai t_{Tabel} , maka hasil ini dapat pula dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak artinya bahwa tidak terdapat pengaruh antara Variabel Independen terhadap Variabel Dependen.
- b) Jika diperoleh Nilai t_{Hitung} sesuai hasil analisis > Nilai t_{Tabel} , maka hasil ini dapat pula dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya bahwa terdapat pengaruh antara Variabel Independen terhadap Variabel Dependen.

b. Uji F atau Uji Simultan

Uji F adalah bentuk pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Variabel Independen (X_1, X_2) secara bersama-sama terhadap Variabel Dependen (Y).

Adapun dasar pengambilan keputusan untuk Uji F atau Uji Simultan ini adalah :

- 1) Berdasarkan nilai Signifikansi
 - a) Jika diperoleh Nilai Signifikansi > Nilai Sig $\alpha = 0,05$, pada Hasil Uji F atau Uji Simultan maka dapat dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak artinya

bahwa secara bersama-sama Belanja Langsung dan Tidak Langsung tidak memiliki hubungan pengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Kabupaten Pinrang

- b) Jika diperoleh Nilai Signifikansi pada Hasil Uji F atau Uji Simultan $< \text{Nilai Sig } \alpha = 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya bahwa secara bersama-sama Belanja Langsung dan Tidak Langsung memiliki hubungan pengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Kabupaten Pinrang

2) Membandingkan nilai F_{Hitung} dengan nilai F_{Tabel}

- a) Jika diperoleh Nilai $F_{Hitung} < F_{Tabel}$ pada Hasil Uji F atau Uji Simultan, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak artinya bahwa secara bersama-sama Belanja Langsung dan Tidak Langsung tidak memiliki hubungan pengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Kabupaten Pinrang
- b) Jika diperoleh Nilai F_{Hitung} pada Hasil Uji F atau Uji Simultan $< F_{Tabel}$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya bahwa secara bersama-sama Belanja Langsung dan Tidak Langsung memiliki hubungan pengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Kabupaten Pinrang

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) menurut Sugiyono (2020) digunakan untuk mengetahui persentase perubahan Variabel

Dependen (Y) yang disebabkan oleh Variabel Independen (X). Jika R^2 semakin besar, maka prosentase perubahan Variabel Dependen (Y) yang disebabkan oleh Variabel Independen (X) semakin tinggi. Demikian pula Jika R^2 semakin kecil, maka prosentase perubahan akan menunjukkan pengaruh sebaliknya

Uji *R Square* (R^2) atau Uji Determinan menurut Imam Ghozali (2018) bertujuan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu, jika diperoleh hasil pengukuran yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas.

Adapun tingkat Korelasi atau Determinan dapat diukur dengan menggunakan skala berikut :

1. Jika Hasil Uji Determinan < 0 maka dapat dinyatakan tidak terdapat Korelasi atau Hubungan Pengaruh antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen
2. Jika Hasil Uji Determinan 0 s.d 0,49 maka dapat dinyatakan bahwa Korelasi atau Hubungan Pengaruh antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen dianggap lemah
3. Jika Uji Determinan 0,50 maka dinyatakan bahwa Korelasi atau Hubungan Pengaruh antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen dapat dianggap Moderat
4. Jika Uji Determinan 0,51 s.d 0,99 maka dapat dinyatakan bahwa Korelasi atau Hubungan Pengaruh antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen dianggap Kuat
5. Jika Uji Determinan > 1 maka dapat dinyatakan bahwa Korelasi atau Hubungan Pengaruh Variabel Independen dengan Variabel Dependen dianggap Sempurna

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pinrang.

Kabupaten Pinrang adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini terletak 185 km dari Kota Makassar arah utara yang berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Luas wilayah kabupaten Pinrang yakni 1.961,77 km² dan terbagi ke dalam 12 Kecamatan, yang meliputi 68 Desa dan 36 Kelurahan serta terdiri dari 86 lingkungan dan 189 dusun.

Pada tahun 2022, jumlah penduduk kabupaten Pinrang sebanyak 411.795 jiwa, dengan kepadatan 210 jiwa/km²

B. Asal mula nama Pinrang

Terdapat beberapa versi mengenai asal pemberian nama Pinrang yang berkembang di masyarakat Pinrang sendiri.

Versi pertama menyebut Pinrang berasal dari bahasa Bugis yaitu kata "*Benrang*" yang berarti "Air Genangan" bisa juga berarti "Rawa-Rawa". Hal ini disebabkan pada awal pembukaan daerah Pinrang masih berupa daerah rendah yang sering tergenang dan berawa.

Versi kedua menyebutkan bahwa ketika Raja Sawitto bernama La Dorommeng La Paletange, bebas dari pengasingan dari kerajaan Gowa. Kedatangan disambut gembira

namun mereka terheran karena wajah raja berubah dan mereka berkata "*Pinra Bawangngi Tappana Puatta Pole Gowa*", yang artinya berubah saja mukanya Tuan Kita dari Gowa. Setelah itu rakyat menyebut daerah tersebut sebagai Pinra yang artinya berubah, kemudian lambat laun menjadi Pinrang.

C. Kondisi Geografi

Kabupaten Pinrang dengan ibu kota Pinrang berada pada posisi 3°19'13" sampai 4°10'30" lintang selatan dan 119°26'30" sampai 119°47'20" bujur timur.

Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah Timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah Barat Kabupaten Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar, sebelah Selatan dengan Kota Parepare.

Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 Km sehingga terdapat areal pertambakan sepanjang pantai, pada dataran rendah didominasi oleh areal persawahan, bahkan sampai perbukitan dan pegunungan.

Kondisi ini mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah Potensial untuk sektor pertanian dan memungkinkan berbagai komoditas pertanian (Tanaman Pangan, perikanan, perkebunan dan Peternakan)

untuk dikembangkan. Ketinggian wilayah 0–500 mdpl (60,41%), ketinggian 500–1000 mdpl (19,69%) dan ketinggian 1000 mdpl (9,90%)

D. Visi dan Misi Kabupaten Pinrang

1. VISI

“Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Penataan Program Pembangunan Pro Rakyat menuju Terciptanya Kawasan Agropolitan yang didukung oleh Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintah”

2. MISI

- a. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah yang professional,
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pelestarian SDA yang berwawasan
- c. lingkungan dan memperkuat agribisnis dan agroindustri,
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat kemandirian lokal,
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
- f. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana serta infrastruktur terutama pada sektor pertanian.
- g. Meningkatkan pengamalan dan nilai-nilai keagamaan, Pancasila dan budaya lokal,
- h. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum.

E. Data Kependudukan

Data Jumlah Penduduk di Kabupaten didasarkan pewilayahan Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.1
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah Kecamatan

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Penduduk (jiwa) <i>Population (people)</i>		Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun <i>Annual Population Growth Rate (%)</i>	
	2022	2023	2020-2023	2022-2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Suppa	34.936	35.723	3,74	2,25
Mattiro Sompe	30.877	31.342	3,94	1,51
Lanrisang	20.266	20.611	4,56	1,70
Mattiro Bulu	31.771	32.328	2,55	1,75
Watang Sawitto	58.773	59.730	5,59	1,63
Paletang	42.962	43.251	1,46	0,67
Tiroang	24.110	24.716	5,58	2,51
Patampanua	38.326	38.859	3,41	1,39
Cempa	19.705	20.027	2,48	1,63
Duampanua	50.403	51.159	1,86	1,50
Batulappa	11.481	11.570	2,56	0,78
Lembang	47.782	48.616	3,59	1,75
Pinrang	411.392	417.932	3,45	1,59

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Pinrang 2024

F. Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Data Pegawai Negeri Sipil yang tersebar pada berbagai Instansi di Kabupaten Pinrang yakni sebanyak 5.352 adapun rincian dari jumlah PNS tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.2
Data Jumlah PNS di Kabupaten Pinrang

Jabatan <i>Occupation</i>	2022		
	Laki-laki <i>Maale</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Junior Executives	26	3	29
Administrator/Administrator	131	45	176
Pengawas/Supervisor	204	177	381
Jabatan Fungsional Guru Certain Functional Position for Teacher	692	1.398	2.090

Jabatan Fungsional Medis Certain Functional Position for Medical Field	137	748	885
Jabatan Fungsional Teknis Certain Functional Position for Technical Field	162	146	308
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana General Functional/Position	714	769	1.483
Jumlah/Total	2.066	3.286	5.352

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Pinrang 2024

G. Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (Ribu), 2019–2023

Bentuk pengukuran terhadap Tingkat Kesejahteraan Penduduk suatu daerah, salah satunya dapat diukur adalah Tingkat Kemiskinan yang ada pada daerah tersebut, adapun perbandingan terhadap Kondisi Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pinrang dibanding dengan daerah lainnya dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 4.3
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (Ribu)

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
Selayar	17,36	17,04	16,93	16,74	16,89
Bulukumba	30,49	30,00	31,31	31,29	30,65
Bantaeng	16,91	16,84	17,78	17,22	17,49
Jeneponto	54,05	53,24	52,35	50,59	48,32
Takalar	25,93	25,38	24,60	24,75	25,01
Gowa	57,99	57,68	58,66	57,96	59,10
Sinjai	22,27	22,06	21,69	21,67	21,14
Maros	34,85	34,62	34,11	33,90	34,96
Pangkep	47,07	47,12	48,40	47,53	46,06
Barru	14,92	14,44	15,18	14,73	14,88
Bone	76,25	81,33	79,64	80,34	80,12
Soppeng	16,45	17,23	17,27	17,21	17,21
Wajo	27,48	27,69	26,22	26,75	27,54

Sidrap	14,44	15,36	15,25	15,56	15,75
Pinrang	31,85	33,56	33,51	33,64	34,23
Enrekang	25,40	25,25	26,13	26,15	26,97
Luwu	46,18	46,04	46,26	46,50	47,67
Tator	28,87	28,41	29,33	29,31	30,23
Luwu-Utara	42,48	42,20	43,15	42,29	40,79
Luwu-Timur	20,83	20,82	20,99	20,89	21,57
Toraja Utara	28,64	27,88	28,39	27,79	29,14
Kota/City					
Makassar	65,12	69,98	74,69	71,83	80,32
Pare-Pare	7,62	7,96	7,93	8,01	7,98
Palopo	14,37	14,71	15,21	14,78	14,85
Sulawesi Selatan	767,80	776,83	784,98	777,44	788,85

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Pinrang 2024

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Hasil Pengolahan Data Penelitian

a. Analisis Belanja Langsung Kabupaten Pinrang

Hasil analisis terhadap Dokumen Laporan Keuangan Kabupaten Pinrang, maka untuk jenis pengeluaran dalam bentuk Belanja Langsung yang dilakukan dari Tahun 2009 hingga Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Analisis Belanja Langsung Kabupaten Pinrang
Tahun 2009-2023

TAHUN	APBD	BELANJA LANGSUNG	% DARI APBD	BELANJA TIDAK LANGSUNG	% DARI APBD
1	2	3	4	5	4
2009	535,204,058,000	260,785,220,000	48.73%	274,359,735,000	51.26%
2010	724,252,832,363	127,182,689,267	17.56%	425,023,418,845	58.68%
2011	678,318,113,796	177,215,941,062	26.13%	498,626,121,534	73.51%
2012	739,081,285,021	262,583,374,803	35.53%	430,796,556,441	58.29%
2013	856,676,699,000	316,422,459,000	36.94%	497,638,775,000	58.09%
2014	947,463,193,472	433,508,834,460	45.75%	513,954,359,012	54.25%
2015	1,290,366,790,312	632,267,664,074	49.00%	658,099,126,238	51.00%
2016	1,327,125,000,000	683,104,000,000	51.47%	644,021,000,000	48.53%
2017	1,291,766,899,212	630,913,035,867	48.84%	593,059,443,796	45.91%
2018	1,351,140,043,260	552,024,944,463	40.86%	799,115,098,797	59.14%
2019	1,291,766,899,212	573,099,850,476	44.37%	718,667,048,736	55.63%
2020	1,331,153,284,255	604,177,604,207	45.39%	726,975,680,048	54.61%
2021	1,374,460,808,334	171,806,496,748	12.50%	1,058,944,797,681	77.04%
2022	1,406,854,266,004	227,636,289,179	16.18%	1,037,310,484,333	73.73%
2023	1,407,348,076,291	203,336,560,525	14.45%	1,055,275,900,466	74.98%
Jumlah	16,552,978,248,532	5,856,064,964,131	35.38%	9,931,867,545,927	60.00%

Sumber : Laporan Keuangan Kab. Pinrang 2009-2023

Berdasar pada permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini, berkaitan dengan Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang pengaruhnya terhadap *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB), maka dari hasil analisis terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Pinrang, selanjutnya dipilah berdasarkan karakteristik belanja yang akan diteliti sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.1 dengan rentang waktu dari Tahun 2009 hingga Tahun 2023.

Sedangkan data mengenai *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) Kabupaten Pinrang selanjutnya dituangkan pada Tabel 5.2 berikut :

Tabel 5.2
Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Pinrang
Tahun 2009-2023

TAHUN	PDRB PERKAPITA	Laju Pertumbuhan PDRB	TAHUN	PDRB PERKAPITA	Laju Pertumbuhan PDRB
1	2	4	5	6	7
2009	12,798,916	7.65%	2017	30,126,000	7.84%
2010	15,068,399	6.23%	2018	48,290,000	6.91%
2011	17,529,224	7.12%	2019	52,050,000	6.53%
2012	24,390,000	8.51%	2020	49,840,000	0.44%
2013	27,380,000	7.28%	2021	53,260,000	5.04%
2014	24,556,000	8.11%	2022	57,410,000	4.53%
2015	26,384,000	8.24%	2023	59,970,000	2.18%
2016	28,133,000	7.44%			

Sumber : Laporan Keuangan Kab. Pinrang 2009-2023

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Laju Pertumbuhannya sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.2 diolah dengan melakukan Analisis terhadap Hasil Pendataan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang.

Tingkat Validitas terhadap data yang akan dijadikan sebagai alat analisis pada penelitian ini dianggap kuat karena didasarkan pada sumber rujukan yang jelas dan juga tervalidasi baik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah dan juga pada Badan Pusat Statistik, sehingga dinyatakan bahwa data-data tersebut layak untuk dijadikan sebagai dasar untuk mengkaji tentang hubungan pengaruh dari masing-masing variabel.

2. Uji Asumsi Klasik

Menguji sebuah data dalam bentuk *Time Series* menurut pandangan beberapa ahli sebaiknya dilakukan melalui beberapa Uji Asumsi Klasik sebelum dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan terhadap Uji Hipotesis melalui Uji Regresi. Adapun Uji Asumsi Klasik yang digunakan dan hasil analisisnya dapat diurai secara runut sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statistic parametik*, sehingga untuk mengetahui apakah data residual telah terdistribusi normal, maka pendekatan yang digunakan yakni dengan mencermati Grafik Histogram Normal *p-p plot of Regression Standarized Residual* dan juga akan dilakukan pengujian dengan menggunakan metode *One Sample Kolmogorov Smirnov*.

Adapun hasil analisis dengan pendekatan kedua metode tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Uji Normalitas dengan Pendekatan Grafik Histogram Normal *p-p plot of Regression Standarized Residual*

Ghozali (2018) menyatakan bahwa pengambilan keputusan untuk metode ini sehingga memenuhi syarat uji normalitas apabila Data Residual dengan nilai ekstrim rendah ataupun tinggi yang terdistribusi dalam grafik mengikuti arah garis diagonalnya dan kebanyakan mengumpul ditengah, atau titik-titik yang merupakan penggambaran dari Data Residual menyebar di sekitar garis maka dapat dikatakan bahwa residual telah terdistribusi dengan normal.

Analisis terhadap Uji Normalitas dengan Metode Grafik Histogram Normal *p-p plot of Regression Standarized Residual* dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 5.1
Uji Normalitas dengan Metode Grafik Histogram
Normal *p-p plot of Regression Standarized Residual*



Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS 2.5

Hasil analisis pada Gambar 5.1 dapat dilihat bahwa Titik-titik dalam Grafik sebagai bentuk penjabaran dari Data Residual nampak berada dialur garis diagonal, dengan kondisi ini maka telah dapat dinyatakan bahwa Data Residual pada Penelitian ini “Telah Terdistribusi Normal”.

2) Uji Normalitas dengan Metode *One Sample Kolmogorov Smirnov*

Pembuktian lainnya untuk mengetahui bahwa Data Residual terdistribusi secara normal juga dapat dilakukan melalui metode *One Sample Kolmogorov Smirnov*, yakni dengan membandingkan *Asymp.Sig.(2-Tailed)* terhadap Nilai Sign (α) 0.05. Hasil Uji Regresi dengan pendekatan metode *One Sample Kolmogorov Smirnov* dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.3
Uji Normalitas Metode *One Sample Kolmogorov Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5678274.10260353
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.077
	Negative	-.078
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS 2.5

Hasil Uji Normalitas dengan metode *One Sample Kolmogorov Smirnov* pada Tabel 5.3 menunjukkan bahwa nilai *Asymp.Sig.(2-Tailed)* yang diperoleh adalah 0.200 artinya lebih besar dari Nilai Sign (α) 0.05, artinya sesuai dengan dasar pengambilan keputusan pada pengujian ini dinyatakan bahwa Data Residual telah terdistribusi secara normal.

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi sering terjadi pada penelitian dengan menggunakan data time series, sebab terkandung kondisi sekarang (periode t) dipengaruhi waktu lalu ($t - n$), atau suatu kondisi dimana sifat residual regresi yang saling berkaitan antara satu observasi ($ke-i$) dengan observasi lainnya ($ke-j$). Oleh karena itu dalam penelitian dengan data time series masalah autokorelasi menjadi hal yang sangat penting diperhatikan, sebab penelitian akan tidak menjadi valid jika terjadi Autokorelasi.

Alat analisis yang sering digunakan untuk menguji Autokorelasi antar Data Residual yakni melalui Uji Durbin Watson. Untuk dapat menjawab dasar pengambilan keputusan terhadap pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai dU dan dL yang diperoleh melalui Tabel Disribusi Durbin Watson dan Hasil Analisis Uji

Autorkorelasi melalui Uji Regresi, adapun persamaan yang digunakan dalam menentukan Nilai dU dan dL yakni $(k;N)$, dimana k adalah jumlah variabel independen pada sebuah penelitian sementara N adalah jumlah sampel.

Berdasar pada Jumlah Variabel dan Sampel pada Penelitian ini, maka nilai $(k;N)$ adalah 2;15 artinya nilai du dan dl dapat dilihat pada Tabel Distribusi Durbin Watson dengan pendekatan Nilai Sign (α) 0.05. setelah nilai tersebut diperoleh selanjutnya diperbandingkan dengan persamaan yang dijadikan dasar pengambilan keputusan pada Uji ini. Sesuai dengan nilai yang ditunjukkan dari perbandingan 2:15 pada distribusi Tabel Durbin Watsin adalah $dU = 0.945$ dan $dL = 1.5432$

Sedangkan hasil analisis untuk Uji Autokorelasi yang diperoleh melalui Uji Durbin Watson dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.4
Uji Normalitas Autokorelasi Durbin Watson
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.938 ^a	.880	.860	6133237.01224	1.408

a. Predictors: (Constant), Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung

b. Dependent Variable: PDRB

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS 2.5

Perbandingan terhadap Nilai dU dan dL terhadap Hasil Uji Autokorelasi untuk Durbin Watson (DW) dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan hasil analisis yang diperoleh maka diketahui nilai $dU = 0.945$, $dL = 1.5432$ dan Nilai Durbin Watson = 1.408, maka berdasarkan persamaan untuk Uji Autokorelasi ini adalah :

- 1) $0 < 1.408 < 1.5432$ hasil persamaan ini dapat diartikan bahwa Autokorelasi dalam penelitian bersifat positif
- 2) Hasil dari $(4 - 1.5432) = 2.4568 > 1.408 < 4$, berarti tidak terjadi Autokorelasi yang bersifat negatif.
- 3) Hasil analisis untuk $2 < d < 4 - dU$ atau $dU < d < 2$, adalah $2 > 1.408 < (4 - 0.945) = 3.055$ berarti tidak terjadi Autokorelasi yang bersifat Negatif melainkan sifat Autokorelasi lebih kearah positif.
- 4) Hasil pengujian untuk persamaan nilai $du < d < 4 - du$ adalah $0.945 < 1.408 < (4 - 0.945) = 3.055$, maka hasil persamaan tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi Autokorelasi.

Berdasar pada hasil analisis terhadap model persamaan yang digunakan untuk melihat Tingkat Autokorelasi dari penelitian ini maka dapat dinyatakan bahwa Penelitian dapat dilanjutkan karena Data Residual yang digunakan dalam penelitian tidak terdeteksi adanya Autokorelasi.

c. Uji Multikolienaritas

Multikolinearitas dapat diartikan bahwa antara variabel independen yang digunakan terdapat hubungan yang linear,

sehingga jika dalam sebuah penelitian terdapat dua variabel bebas memiliki korelasi yang sangat kuat, maka secara logika dalam persamaan regresi hanya dapat diwakili oleh salah satu variabel. Mendeteksi apakah variabel dalam sebuah penelitian memiliki keterikatan Multikolinearitas yang kuat, maka oleh Sujarweni (2020) menyatakan bahwa :

- 1) Jilai Nilai Tolerance $> 0,10$ dan Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 maka hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi adanya Multikolinearitas antar variabel independen.
- 2) Jilai Nilai Tolerance $< 0,10$ dan Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10 maka hal ini menunjukkan bahwa terjadi adanya Multikolinearitas antar variabel independen.

Membuktikan apakah hasil regresi terhadap data yang telah dianalisis melalui Uji Regresi, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5.5
Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a			
Model		Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Collinearity Tolerance	Statistics VIF
1	(Constant)	-9469954.519	5513512.476		
	Belanja Langsung	1.387	.000	1.000	1.000
	Belanja Tidak Langsung	6.096	.000	1.000	1.000

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS 2.5

Memperhatikan hasil analisis yang dituangkan pada Tabel 5.4, maka dapat disimpulkan bahwa Variabel Belanja Langsung dan Tidak Langsung tidak memiliki hubungan Multikolinearitas karena Nilai VIF yang diperoleh yakni 1.000 lebih kecil dari 10 dan demikian pula untuk Tolerance diperoleh nilai sebesar $1.000 > 0,10$.

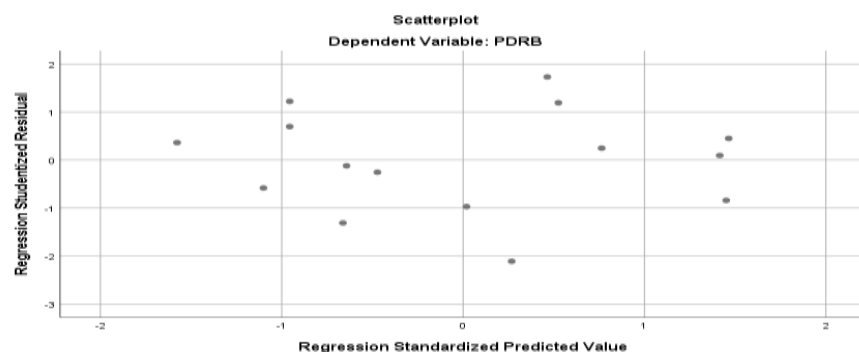
d. Uji Heteroskidastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Menguji apakah antara Varians yang digunakan dalam sebuah penelitian tidak terjadi hubungan *Heteroskedastisitas*, jika metode yang digunakan adalah *Scatterplot Regresi*, menurut Ghozali (2018) persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
- 2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- 3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- 4) Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Menguji apakah dalam penelitian ini tidak terdapat kesamaan Varians dan Residual, dapat dilihat pada hasil Uji Regresi dengan model *Scatterplot Regresi*, di bawah ini :

Gambar 5.2
Uji Heteroskidastisitas



Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS 2.5

Scaterplot Regresi terhadap data pada semua Variabel Bebas menunjukkan bahwa titik-titik yang merupakan interpretasi dari setiap data pada Variabel Bebas menyebar kearah atas dan bawah dan juga tidak berada satu kelompok serta penyebaran dari titik-titik tersebut bersifat acak.

Berdasar pada kondisi tersebut maka dapat dinyatakan bahwa data-data yang digunakan dalam penelitian ini tidak memiliki varians yang sama atau dengan kata lain antar variabel tidak terjadi hubungan *Heteroskedastisitas*

B. Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi yang digunakan dalam penelitian ini karena membahas adanya dua variabel Independen, maka sering diistilahkan dengan Analisis Regresi Linear Berganda. Adapun Hasil analisis untuk Uji Regresi Linear Berganda dalam rangka melihat pola hubungan antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.6
Analisis Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	-9469954.519	5513512.476	-1.718	.112
	Belanja Langsung	1.387	.000	1.627	.130
	Belanja Tidak Langsung	6.096	.000	9.235	.000

a. Dependent Variabel : PDRB

Sumber : Diolah dengan Menggunakan SPSS 25 Tahun 2023

Berdasarkan analisis Uji Regresi Linear Berganda sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 5.6 maka pernyataan atau kesimpulan yang dapat diambil terhadap hasil analisis tersebut dapat dijabarkan melalui persamaan berikut :

$$Y = -9469954.519 + 1.387(X_1) + 6.096(X_2) + e$$

Uraian dari persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Terhadap Nilai Konstanta (α) yang diperoleh menunjukkan bahwa PDRB memiliki nilai negatif sebesar **-9469954.519**, hal ini dapat diartikan bahwa jika tidak terjadi pengeluaran dari pihak pemerintah dalam bentuk Belanja Langsung dan Tidak Langsung, maka Pertumbuhan PDRB dapat mengalami penurunan sebesar **-9469954.519**. Semakin kecil nilai dari pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah maka PDRB cenderung arahnya bersifat negatif.
- b. Apabila terjadi peningkatan atau kenaikan pada Nilai β untuk Belanja Langsung sebesar **1.387** point, sementara Nilai β pada Belanja Tidak Langsung diasumsikan 0 (Nol), maka dapat dinyatakan bahwa Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) Kabupaten Pinrang penurunannya dapat ditekan sebesar **1.387**.
- c. Apabila terjadi peningkatan atau kenaikan pada Nilai β untuk Belanja Tidak Langsung sebesar **6.096** point, sementara Nilai β pada Belanja Langsung diasumsikan 0 (Nol), maka dapat

dinyatakan bahwa Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) Kabupaten Pinrang penurunannya dapat ditekan sebesar **6.096 point**

2. Uji Parsial (Uji T)

Dasar pengambilan keputusan untuk Uji Hipotesis (Uji T) secara Parsial dapat dilakukan dengan 2 (Dua) cara yakni :

1. Berdasarkan Nilai Signifikansi (0,05)
 - a) Jika diperoleh Nilai Signifikansi $>$ Nilai Sig $\alpha = 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak artinya antara Variabel Independen tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap Variabel Dependen.
 - b) Jika diperoleh Nilai Signifikansi $<$ Nilai Sig $\alpha = 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya antara Variabel Independen memiliki hubungan yang signifikan terhadap Variabel Dependen
2. Memperbandingkan Nilai t_{Hitung} dengan Nilai t_{Tabel}
 - c) Jika diperoleh Nilai t_{Hitung} sesuai hasil analisis $<$ Nilai t_{Tabel} , maka hasil ini dapat pula dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak artinya bahwa tidak terdapat pengaruh antara Variabel Independen terhadap Variabel Dependen.
 - d) Jika diperoleh Nilai t_{Hitung} sesuai hasil analisis $>$ Nilai t_{Tabel} , maka hasil ini dapat pula dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya bahwa terdapat pengaruh antara Variabel Independen terhadap Variabel Dependen.

Mendukung pengambilan keputusan terhadap sebuah uji hipotesis, maka salah satu alat ukur yang dibutuhkan sebagai perbandingan adalah nilai t_{Tabel} , dimana untuk menentukan nilai ini dapat diperoleh dengan persamaan berikut :

$$t_{Tabel} = \alpha/2 ; n - k - 1$$

Dimana

α = Nilai Signifikansi 0,05

n = Jumlah Responden

k = Jumlah Variabel

Penentuan terhadap nilai t_{Tabel} pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

$$t_{Tabel} = 0,05/2 ; 15 - 3 - 1$$

$$t_{Tabel} = 0,025 ; 12$$

Hasil perhitungan ini dapat diartikan bahwa untuk nilai t_{Tabel} sebagaimana dituangkan pada Tabel Distribusi Nilai t berada pada kolom uji dua arah dengan nilai 0,025 dan untuk nilai Derajat Kebebasan (DK) berada pada angka 12. Sehingga nilai t_{Tabel} yakni = **2.178**.

Berdasar pada hasil analisis yang ditunjukkan pada Tabel 5.9 maka keputusan yang dapat diambil untuk masing-masing Hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) **H₁** = *Diduga Belanja Langsung berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang*

Hasil analisis Uji Regresi Linear Berganda pada Tabel 5.6 menunjukkan bahwa untuk nilai t_{Hitung} yang

diperoleh terhadap pengaruh Belanja Langsung terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang adalah sebesar **1.627**, dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai t_{Tabel} yakni = **2.178**. Jika merujuk pada dasar pengambilan keputusan untuk Uji Parsial yang membandingkan antara nilai t_{Hitung} dengan nilai t_{Tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak artinya bahwa Belanja Langsung tidak memberikan pengaruh terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang.

Sementara jika melihat tingkat signifikansi dari hubungan pengaruh Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperoleh nilai sebesar **0.130**, yang artinya nilai ini lebih besar dari nilai Signifikansi 0.05. Sehingga pernyataan yang dapat diambil yakni H_0 diterima dan H_a ditolak artinya Belanja Langsung tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang.

Berdasar pada kedua hasil pengujian tersebut maka kesimpulan terhadap Uji Hipotesis dapat dinyatakan bahwa Belanja Langsung tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan Pertumbuhan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang, dengan kata lain bahwa H_0 diterima dan H_a atau Hipotesis yang diajukan ditolak.

- 2) H_2 = *Diduga Belanja Tidak Langsung berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang.*

Hasil Uji Hipotesis yang juga menjadi bagian dari Uji Regresi Linear Berganda sebagaimana dituangkan pada Tabel 5.6 menunjukkan bahwa Nilai t_{Hitung} untuk pola hubungan antara Belanja Tidak Langsung terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang adalah sebesar **9.235**, sementara untuk Nilai Signifikansinya yakni **0,000**. Sehingga keputusan yang dapat diambil yakni :

- a) Bahwa nilai t_{Hitung} dari Belanja Tidak Langsung menunjukkan angka sebesar **9.235** dan nilai ini lebih besar dari nilai $t_{Tabel} = 2.178$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya Belanja Tidak Langsung memberikan pengaruh yang positif terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang
- b) Sementara untuk tingkat signifikansi dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari hasil analisis Uji Regresi

diperoleh nilai sebesar **0.000** atau lebih kecil dari Nilai Signifikansi 0.05. Maka keputusan dari hasil analisis ini adalah H_0 ditolak dan H_a diterima artinya Belanja Tidak Langsung memiliki hubungan pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang

Kesimpulan dari hasil pernyataan tersebut bahwa Belanja Tidak Langsung secara signifikan dapat memberikan pengaruh terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang, dengan kata lain H_0 ditolak dan H_a atau Hipotesis yang diajukan diterima

c. Uji F (Uji Simultan)

Dasar pengambilan keputusan untuk Uji F atau Uji Simultan ini adalah :

- 1) Berdasarkan nilai Signifikansi
 - a) Jika diperoleh Nilai Signifikansi pada Hasil Uji F atau Uji Simultan $>$ Nilai Sig $\alpha = 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak artinya bahwa secara bersama-sama Variable Independen (X1 dan X2) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Variabel Dependen
 - b) Jika diperoleh Nilai Signifikansi pada Hasil Uji F atau Uji Simultan $<$ Nilai Sig $\alpha = 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya bahwa

secara bersama-sama variable independen (X1 dan X2) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Variabel Dependen

- 2) Membandingkan nilai F_{Hitung} dengan nilai F_{Tabel} yang tersedia pada ($\alpha=5\%$) dengan $df=k; n-(k+1)$
 - a) Jika diperoleh Nilai F_{Hitung} pada Hasil Uji F atau Uji Simultan $< F_{Tabel}$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak artinya bahwa secara bersama-sama Variable Independen (X1 dan X2) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Variabel Dependen
 - b) Jika diperoleh Nilai F_{Hitung} pada Hasil Uji F atau Uji Simultan $> F_{Tabel}$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya bahwa secara bersama-sama Variable Independen (X1 dan X2) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Variabel Dependen

Untuk memperoleh nilai F_{Tabel} dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut :

$$Df = k; n-(k+1)$$

Dimana

n = Jumlah Responden

k = Jumlah Variabel Independen

Hasil perhitungan untuk menentukan nilai F_{Tabel} dapat diuraikan sebagai berikut :

$$Df = 2; 15-(2 + 1)$$

$$Df = 2 ; 12$$

Sehingga dari hasil tersebut ditetapkan bahwa nilai F_{Tabel}

berdasarkan Tabel Dstribusi nilai F diperoleh **3.89**

Melihat apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.7
Analisis Uji F (Uji Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3315216726545561.500	2	1657608363272780.800	44.066	.000 ^b
	Residual	451399154980168.940	12	37616596248347.414		
	Total	3766615881525730.500	14			

a. Dependent Variable: PDRB

b. Predictors: (Constant), Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung

Sumber : Diolah dengan Menggunakan SPSS 25 Tahun 2023

Hasil Analisis Uji Anova yang ditunjukkan pada Tabel 5.7 memberikan gambaran bahwa nilai F_{Hitung} yang diperoleh sebesar **44.066**, sementara Nilai Signifikansinya adalah **0,000**. Maka sesuai dasar pengambilan keputusan untuk Uji F atau Uji Simultan dapat dinyatakan bahwa :

- a) Hasil analisis melalui Uji ANNOVA menunjukkan bahwa Nilai F_{Hitung} yang diperoleh adalah sebesar **44.066** atau lebih besar dari nilai F_{Tabel} yakni **3.09**, merujuk pada hasil analisis ini dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima artinya bahwa jika secara bersama-sama Variabel Belanja Langsung dan Tidak Langsung memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang

b) Hasil perbandingan untuk Nilai Signifikansi, berdasarkan Hasil analisis melalui Uji ANNOVA diperoleh bahwa Nilai Signifikansi dari hasil analisis yakni **0.000** atau lebih kecil dari Nilai Signifikansi **0.05**. Maka kesimpulan yang dapat diambil yakni H_0 ditolak dan H_a diterima artinya bahwa secara bersama-sama Belanja Langsung dan Tidak Langsung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang

Berdasar pada kedua hasil penjabaran tersebut maka dapat dinyatakan bahwa Belanja Langsung dan Tidak Langsung jika secara bersama-sama mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang, atau dengan kata lain H_0 ditolak dan H_a atau Hipotesis yang diajukan diterima

3. Koefisien Determinasi atau Uji *R Square* (R^2)

Koefisien Determinasi atau Uji *R Square* (R^2) menurut Sugiyono (2020) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan dari variabel Independen (X) mampu mempengaruhi dan menjalskan keberadaan dari Variabel Dependen (Y).

Adapun hasil analisis untuk Uji Determinasi dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.8
Analisis Uji Determinasi (R^2)

Model Summary^b			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.938 ^a	.880	.860

a. Predictors: (Constant), Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung

b. Dependent Variable: PDRB

Sumber : Diolah dengan Menggunakan SPSS 25 Tahun 2023

Hasil Analisis untuk Uji Determinasi sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5.8, menunjukkan bahwa nilai *R Square* yang diperoleh adalah 0,880 atau sama dengan 88,0%. Angka tersebut dapat diartikan bahwa Belanja Langsung dan Tidak Langsung dalam menjabarkan pengaruh terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang, memiliki tingkat Determinan yang sangat kuat .

Adapun Tingkat Korelasi atau Hubungan antara Variabel Independen terhadap Variabel Dependen jika didasarkan pada nilai *R Square* yang diperoleh yakni 0,880, maka sesuai dasar penetapan korelasi antar variabel, dimana hasil Uji Determinan dapat digolongkan sangat kuat

C. Pembahasan.

1. Belanja Langsung Tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang

Tingkat Kesejahteraan masyarakat pada saat ini masih menjadi sebuah pekerjaan rumah paling berat yang harus mampu dilakukan pemerintah. Pengentasan Kemiskinan menjadi bagian

yang tak terpisahkan dari seluruh program yang dilakukan oleh pemerintah termasuk didalamnya penyelenggaraan keuangan di bidang pembangunan. Olehnya itu Belanja Langsung atau sering diistilahkan dengan Belanja Modal diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi disebuah daerah.

Mencermati perkembangan atau pertumbuhan tingkat perekonomian disuatu daerah maka salah satu yang menjadi tolak ukurnya dapat dilihat dari laju Pertumbuhan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga jika dihubungkan dengan jenis belanja pemerintah yang berorientasi pada pengembangan sarana dan prasarana, maka melalui pembelanjaan tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung pertumbuhan dibidang ekonomi.

Permasalahan yang ditemukan di Kabupaten Pinrang jika merujuk pada kegiatan pembelanjaan yang dilakukan sejak Tahun 2009 hingga 2023 yang dihubungkan dengan laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maka dapat dikatakan bahwa kebijakan pemerintah terhadap Belanja Modal belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laju pertumbuhan Income perkapita masyarakat di Kabupaten Pinrang.

Kondisi serupa juga dikemukakan oleh Abdul Rajab, Muchtar (2023) dalam penelitiannya yang melihat bahwa Belanja Modal atau Belanja Langsung belum memberikan pengaruh

secara signifikan terhadap laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dikarenakan Belanja Modal tersebut tidak diperuntukkan pada jenis pembangunan yang dapat mendorong peningkatan faktor-faktor produksi di masyarakat, melainkan lebih diorientasikan pada proses pembelian aset tetap atau aset lainnya yang tidak memiliki hubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mustina Ayu (2020) dalam penelitiannya bahkan menilai bahwa Belanja Modal dianggap dapat memiliki pengaruh negatif walaupun tidak signifikan terhadap PDRB, karena semestinya anggaran yang dapat digunakan untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana sehingga berafiliasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat akan tetapi lebih diorientasikan pada hal yang dianggap kurang bermanfaat bagi masyarakat.

Sejalan dengan pandangan tersebut Muh. Resa Saputra (2021) berpandangan bahwa Belanja Langsung atau Belanja Modal pada dasarnya dapat memberikan pengaruh yang signifikan, jika alokasi belanja modal tersebut digunakan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan maka akan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat berafiliasi terhadap peningkatan PDRB.

Penekanan inilah yang dikemukakan oleh Heni Rahmawati (2022) bahwa pengeluaran pemerintah secara umum dapat

dikatakan sangat berpengaruh dan memberikan dampak terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian disuatu daerah, sebab pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki tujuan khusus yakni menjaga stabilitas perekonomian masyarakat, terutama pada beberapa sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan perekonomian seperti Sektor-Sektor Produksi, Sektor Distribusi, Sektor Konsumsi Masyarakat dan Sektor Keseimbangan Perekonomian.

Mendukung pernyataan tersebut Parno, dkk (2023) juga mengemukakan bahwa dalam hal efisiensi terhadap penggunaan anggaran, sangatlah wajar jika pemerintah melakukan pemilahan terhadap peruntukan setiap jenis pembelanjaan, namun hal mendasar perlu dipikirkan agar efisiensi dan pertumbuhan ekonomi berjalan seimbang, maka sebaiknya pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah lebih diorientasikan pada peningkatan faktor-faktor produksi, sehingga semua golongan dapat terbantu.

2. Belanja Langsung berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang

Pembelanjaan yang dianggap memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yakni Belanja Tidak Langsung dimana salah satu jenis pembelanjaan pada program ini selain Gaji Pegawai juga terdapat Bantuan Sosial bagi masyarakat. Abdul Rajab (2022) dalam hasil penelitiannya juga mempertegas hal tersebut dimana menurut

pengamatan yang dilakukan bahwa melalui belanja pegawai dan pemberian bantuan sosial ke masyarakat secara langsung dapat memberikan dampak pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena transaksi keuangan dapat terjadi secara langsung melalui pembelanjaan yang dilakukan oleh para pegawai dan masyarakat, sehingga kegiatan moneter mampu berjalan dan hal inilah yang dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kondisi tersebut tidak dapat dipungkiri dimana dari jumlah penduduk Kabupaten Pinrang yakni sebanyak 417.932 jiwa, terdapat 5.532 orang memiliki Status Pegawai Negeri Sipil, dengan jumlah tersebut siklus moneter akan memberikan dampak sangat besar pada kegiatan perekonomian masyarakat. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang berdasarkan hasil perumusan terhadap laju pertumbuhan perekonomian menempatkan belanja pemerintah menjadi penyumbang terbesar dalam mendukung kondisi yang dianggap memiliki tantangan terbesar disepanjang Tahun 2003 karena adanya faktor alam yang sangat tidak mendukung bagi semua pihak.

Berdasar pada kondisi semacam inilah sehingga Prisilia Tempone (2020) memberikan penjelasan pada kesimpulan dari hasil penelitiannya bahwa hanya belanja tidak langsung saja yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan Belanja Langsung tidak berpengaruh. Hal ini

memberi indikasi bahwa alokasi anggaran belanja langsung pemerintah belum banyak memberi pengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi padahal melalui alokasi belanja langsung inilah pemerintah punya peran besar meningkatkan perekonomian melalui pengalokasian anggaran pembangunan atau infrastruktur agar laju perekonomian dapat meningkat

3. *Belanja Langsung dan Tidak Langsung secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang*

Keberadaan Belanja Langsung dan Tidak Langsung yang merupakan bagian dari Pembelanjaan Pemerintah pada dasarnya memiliki peranan penting dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Menjadi sangat sulit jika hanya berharap pada Belanja Langsung untuk dijadikan dasar utama sebagai tonggak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, sebab mungkin tidak disadari oleh beberapa pihak Belanja Tidak Langsung dari pemerintah justru memegang peranan yang tidak dapat dipungkiri dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Memadukan kedua bentuk pembelanjaan tersebut oleh Abdul Rajab, Muchtar (2023) memberikan penekanan bahwa pihak pemerintah semestinya selalu memperhatikan bentuk pembelanjaan yang dilakukan khususnya berkaitan dengan

belanja langsung, dimana sebaiknya terhadap pembelian aset yang afiliasinya rendah dalam mendukung untuk faktor-faktor produksi dimasyarakat porsi penganggarnya dibatasi.

Heni Rahmawati (2022) juga berpandangan bahwa Pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Hal ini dikarenakan pengeluaran pemerintah secara langsung mendukung kegiatan pertumbuhan ekonomi. Seperti pembangunan infrastruktur yang mempermudah distribusi produk baik berupa barang ataupun jasa, dengan demikian pertumbuhan ekonomi masyarakat akan semakin baik

Kabupaten Pinrang dapat dikatakan memiliki Laju Pertumbuhan Ekonomi yang cukup baik, walaupun dalam porsi penganggaran sejak Tahun 2021 mengurangi porsi untuk Belanja Langsung, dimana dari segi persentase terlihat 77% lebih diperuntukkan pada kegiatan Belanja Tidak Langsung, hal ini dilakukan karena melihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi kondisi yang diluar prediksi seperti bencana Pandemic Covid-19, terjadinya Banjir dan bencana Elnino, mengakibatkan pemerintah mengambil sikap dengan merubah porsi belanja mereka. Hanya saja walaupun berada ditengah berbagai bentuk bencana, namun di Tahun 2023 Laju Pertumbuhan PDRB Daerah ini masih mampu meningkat sebanyak 2%.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasar pada Hasil Penelitian dan Pembahasan terkait dengan Pengaruh Belanja Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang, maka kesimpulan yang dapat diambil yakni :

1. Belanja Langsung atau Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang, hal ini disebabkan karena sifat pembelanjaan dari pemerintah tidak difokuskan pada jenis pembangunan yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Belanja Tidak Langsung memiliki pengaruh yang sangat signifikan berpengaruh Signifikan terhadap terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang, karena belanja pegawai sebagai salah satu item dari Belanja Langsung asas manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat
3. Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang. Kondisi ini pada dasarnya telah dapat dilihat pada peran pemerintah yang dianggap mampu menopang pertumbuhan perekonomian yang ada ditengah masyarakat, ditengah banyaknya bencana dan

musibah, dan kesemuanya sangat berdampak pada persoalan perekonomian dimasyarakat.

B. Saran-saran

Hal-hal yang dapat disarankan kepada Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang terkait dengan permasalahan Belanja Langsung dan Tak Langsung antara lain :

1. Mendukung agar Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dapat menjadi lebih baik, maka optimalisasi terhadap pemberian bantuan kemasyarakat lebih diarahkan pada peningkatan faktor-faktor produksi seperti perbaikan irigasi, pembuatan embung dalam rangka mengantisipasi jika terjadi bencana seperti elnino.
2. Penyusunan Anggaran khususnya terkait dengan Belanja Langsung dan Tidak Langsung sebaiknya selalu memperhatikan asas skala prioritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Iqbal. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Abdul Halim dan M. Syam Kusufi., 2019., *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4, Bandung: Salemba Empat
- Abdul Rajab. 2022. Pengaruh Belanja Tidak Langsung Terhadap Produk Domestik Regional Bruto. *AKUNTABEL: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Volume. 19 Issue 1 (2022) Pages 33-41
- Abdul Rajab, Muchtar. 2023. Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat PDRB Provinsi Sulawesi Barat. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Volume 25 Issue 2 (2023) Pages 280-289
- Abubakar, R. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press
- Ansori, M. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi 2*. Airlangga University Press
- Arikunto, S. 2020. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arsyad, L. 2022. *Pengantar Perencanaan Ekonomi Daerah (edisi kedua)*. BPFE UGM.
- Bastian. 2019. *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Modul.
- BPS. 2022. *Berita Resmi Statistik Nomor 14/02/Th.XXV, 7 Februari 2022 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- BPS. 2024. *Berita Resmi Statistik No. 05/02/7315/Th. IV, 29 Februari 2024 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang Tahun 2023*
- BPS. 2023. *Berita Resmi Statistik No. 01/03/7315/Th. III, 03 Maret 2023 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang Tahun 2022*
- BPS. 2021. *Berita Resmi Statistik No 05/02/7315/Th.I, 26 Februari 2020 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang Tahun 2021*
- BPS Kab. Pinrang, 2024. *Kabupaten Pinrang Dalam Angka Tahun 2024*
- BPS Kab. Pinrang, 2023. *Kabupaten Pinrang Dalam Angka Tahun 2022*

- BPS Kab. Pinrang, 2022. Kabupaten Pinrang Dalam Angka Tahun 2021
- BPS Kab. Pinrang, 2021. Kabupaten Pinrang Dalam Angka Tahun 2020
- BPS Kab. Pinrang, 2020. Kabupaten Pinrang Dalam Angka Tahun 2019
- Elfindri, dkk. 2019. Ekonomi Pembangunan Daerah. Rajawali Pers. Jakarta.
- Faud, M dkk 2020. Anggaran Perusahaan. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Heni Rahmawati, 2022. Analisis Fungsi Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. Jurnal STEI Ekonomi (JEMI). Volume 31 Number 02 (Desember 2022): 77 - 82
- Imam Ghozali, 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS” Edisi Sembilan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Leasiwal, Teddy Cristianto. 2022. Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya dengan Variabel Makro Ekonomi, Selayo: Mitra Cendekia Media
- Mahmudi. 2019. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPIN
- Mardiasmo. 2021. Akuntansi Sektor publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mudrajad Kuncoro. 2020. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
- Muh. Resa Saputra, Haliah, dan Aini Indrijawati, 2021. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. Akrua: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer Vol. 14 No. 2 Juli 2021: 129-134
- Mulyana, B. & Sugiri, D. 2020. Pengelolaan Keuangan Daerah. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN
- Mustina Ayu, 2020. Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang, Dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
- Nordiawan, Dedi. 2019. Akuntansi Sektor Publik Jakarta : Salemba Empat
- Parno, Daru Tri Rekso Joko Nuryanto. 2023. Hubungan Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Kalimantan Melalui Pendekatan Stochastic Frontier Analysis. Jurnal Manajemen Perbendaharaan — Volume 4, Nomor 1, 2023, 35-50

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Prisilia Tempone, Josep B. Kalangi, Hanly Fendy DJ, Siwu, 2020. Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 20 No. 01 Tahun 2020
- Priyarsono, DS. 2019. Ekonomi Regional: Ed. Kedua. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Purba, B. 2021. Ekonomi Pembangunan. Yayasan Kita Menulis
- Sadono, Sukirno. 2021. Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijaksanaan, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI dengan Bima Grafika.
- Santoso, Singgih, 2018. Menguasai Statistik dengan SPSS 25, Jakarta: PT Gramedia,
- Siagian, P. Sondang. 2020. Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV
- Siregar, R. 2021. Ekonomi Pembangunan: Tinjauan Manajemen dan Implementasi Pembangunan Daerah. Yayasan Kita Menulis.
- Sujarweni, V. W. 2020. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sukandarrumidi. 2018. Metodologi Penelitian. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Sukamiati, Lestari et. all. 2021. Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta: UAD Press
- Sumiyarti, 2022. Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan. Srikandi: Journal of Islamic Economic and Banking. Volume 1, Nomor 1, Januari 2022
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah